



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMRI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 416890

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **960.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 15.000 m2/15.000 m2 di KAB / KOTA SELUMA, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 20.000 m2/20.000 m2 di KAB / KOTA SELUMA, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/450 m2 di KAB / KOTA SELUMA, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **79.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **2.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.042.000.000**

III. HUTANG **Rp.** **258.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **784.000.000**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.